

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Secara umum atau global, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keinginan negara tersebut untuk memperluas pengaruh demokrasi mereka ke seluruh penjuru dunia atau dengan kata lain melakukan demokratisasi secara internasional.³⁸ Tentu saja juga memicu untuk menyuarakan liberalis kapitalis dan membendung ideologi-ideologi yang bersifat sosialis radikal. Hal tersebut berhubungan dengan prinsip dasar dari politik luar negeri Amerika Serikat dalam mengelola sistem politik di dunia, namun secara fundamental harus *compatible* dengan nilai-nilai tradisional Amerika Serikat, yaitu demokrasi dan kebebasan individu.³⁹

Menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton dalam pidatonya pada 13 Februari 2009 di lembaga *The Asia Society*, menyatakan bahwa masyarakat di dunia tidak akan dapat memecahkan persoalan tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Melihat hal tersebut, setiap permasalahan dunia baik dalam lingkup regional maupun global, Amerika Serikat selalu terlibat baik sebagai bagian dari masalah tersebut atau dalam mencari penyelesaiannya secara langsung maupun tidak langsung. Keikutsertaan Amerika Serikat dalam masalah di Timur Tengah tidak terlepas dari doktrin baru yang muncul Pasca Perang Dingin, yaitu

³⁸ Sri Winingsih, 2009, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran*, FISIP UI, diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778-Kebijakan%20luar%20negeri-Analisis.pdf> pada 6 April 2017.

³⁹ Agus N. Cahyo, 2011, *Tokoh-Tokoh Timur Tengah yang Diam-diam Jadi antek Timur Amerika dan Sekutunya*, Yogyakarta, DIVA Press, hal. 35.

perluasan hegemoni yang berlandaskan atas keyakinan bahwa dunia baru akan dikuasai oleh liberalisme milik Amerika Serikat.⁴⁰

Kebijakan atau Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus meraih keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Maka, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Terdapat dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Hal tersebut yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara, termasuk Amerika Serikat.⁴¹

Setiap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikeluarkan dengan dalih untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, tetap saja pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasional Amerika Serikat. Terpenting kebijakan tersebut dapat memenuhi atau menjadi jalan bagi pencapaian tujuan Amerika Serikat yang sesungguhnya.⁴²

Timur Tengah merupakan kawasan yang mempunyai posisi geografis yang sangat penting bagi dunia, karena kawasan ini adalah poros dari jalur dunia antara Benua Eropa, Asia, dan Afrika. Selain memiliki posisi geografis yang

⁴⁰ *Ibid*, hal. 38.

⁴¹ *Sri Winingsih, Op.Cit.*

⁴² *Ibid.*

strategis, keunggulan Timur Tengah juga terletak pada sumber daya alamnya, yaitu sekitar 65% cadangan minyak dunia.⁴³

Gambar 2.1. Timur Tengah sebagai Penghubung Eropa-Asia-Afrika



Sumber: Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, hal. 9.

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Pembahasan tersebut akan diulas lebih mendalam melalui dasar-dasar politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kebijakan Amerika Serikat pasca *Arab Spring*, Standar Ganda Amerika Serikat di Timur Tengah, dan posisi sentral Mesir di Kawasan Timur Tengah.

A. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri AS di Timur Tengah

Amerika Serikat mulai memberikan perhatian cukup serius terhadap kawasan Timur Tengah, seiring dengan beroperasinya berbagai perusahaan tambang minyak Amerika Serikat di kawasan tersebut.⁴⁴

⁴³ICMES, 6 Februari 2016, *Memetakan Minyak Timur Tengah*, diakses dalam <http://icmes.org/energy/jurnal-memetakan-minyak-timur-tengah/> pada 6 April 2017.

⁴⁴ *Sidik Jatmika, Op.Cit.*, hal. 135.

Hal tersebut bermula pada tahun 1932-1934 ketika ditemukan sumber minyak di Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait. Kemudian Amerika Serikat mulai mengembangkan sayapnya di kawasan penghasil minyak tersebut. Amerika Serikat berhasil mendapatkan konsesi untuk memanfaatkan hasil bumi tersebut. Sejak 29 Mei 1933, “*Standard Oil Company*” dari California meraih hak eksplorasi minyak selama 60 tahun meliputi daerah yang luas di bagian timur Arab Saudi.⁴⁵

Californian Arabian Standard Oil didirikan sebagai perusahaan penambangan minyak. Pada tahun 1934, perusahaan minyak Texas bergabung dan nama perusahaan tersebut diubah menjadi *Arabian Oil Company* (Aramco). Salah satu langkah permulaan bagi para pemegang konsesi, yaitu harus memberikan pinjaman 30.000 poundsterling dalam bentuk emas kepada pemerintah Arab Saudi yang sedang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh depresi dunia. Perusahaan Amerika Serikat melakukan hal tersebut atas risiko sendiri menangani masalah keuangan yang begitu besar karena memang pada saat itu, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan perhatian untuk mendukung beroperasinya perusahaan tersebut.⁴⁶ Namun, pinjaman tersebut menghasilkan *dividen* yang prospektif berupa itikad baik dan kemudian terbukti bahwa secara ekonomi dapat dibenarkan.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hal. 136.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Diakses dalam http://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v46/news01_vol46_Dividen.html pada 6 April 2017.

Semenjak saat itu dan dilanjutkan pada masa presiden Roosevelt, Amerika Serikat memulai melakukan kegiatan intervensinya yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkokoh hegemoninya di kawasan Timur Tengah yang berpenduduk mayoritas muslim tersebut. Roosevelt berpandangan bahwa kawasan Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak raksasa di dunia.⁴⁸

Pada tahun 1944, Roosevelt mengadakan negosiasi bersama duta besar Inggris untuk saling menggunakan minyak bumi Timur Tengah. “Minyak kawasan Persia adalah milik kalian. Kita bagi bersama minyak Irak dan Kuwait. Sedangkan mengenai Arab Saudi, maka minyaknya milik kita bersama”, tegas Roosevelt. Sehingga pada 8 Agustus 1944, ditandatangani perjanjian Inggris-Amerika Serikat untuk saling memanfaatkan hasil minyak bumi Timur Tengah. Pada tahun 1945, Amerika Serikat mulai membangun pangkalan militer di Dahrhan. Pasca Perang Dunia II (1945), Amerika Serikat mengambil alih posisi Inggris sebagai *Super Power* dengan tugas utama diantaranya, menjaga kepentingan aliansi Barat di kawasan Timur Tengah.⁴⁹

B. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis karena kawasan ini merupakan jalur pertemuan dari tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Dalam perkembangan politik luar negerinya Amerika Serikat sebagai

⁴⁸ *Sidik Jatmika, Op.Cit.*, hal. 136.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 136-137.

negara adidaya secara terang-terangan telah terlibat dalam gejolak politik dan keamanan di kawasan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

1. Kebutuhan akan Minyak

Minyak mentah masih menjadi sumber utama pemasok energy di dunia. Menurut data organisasi negara-negara penghasil minyak (OPEC) menyebutkan bahwa konsumsi minyak mentah dunia mencapai 95 juta barel/hari.⁵⁰ Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dalam kebutuhan minyak mentah di dunia yang mencapai 19 juta barel/hari, jumlah tersebut lebih besar dibanding kebutuhan negara-negara lain.⁵¹

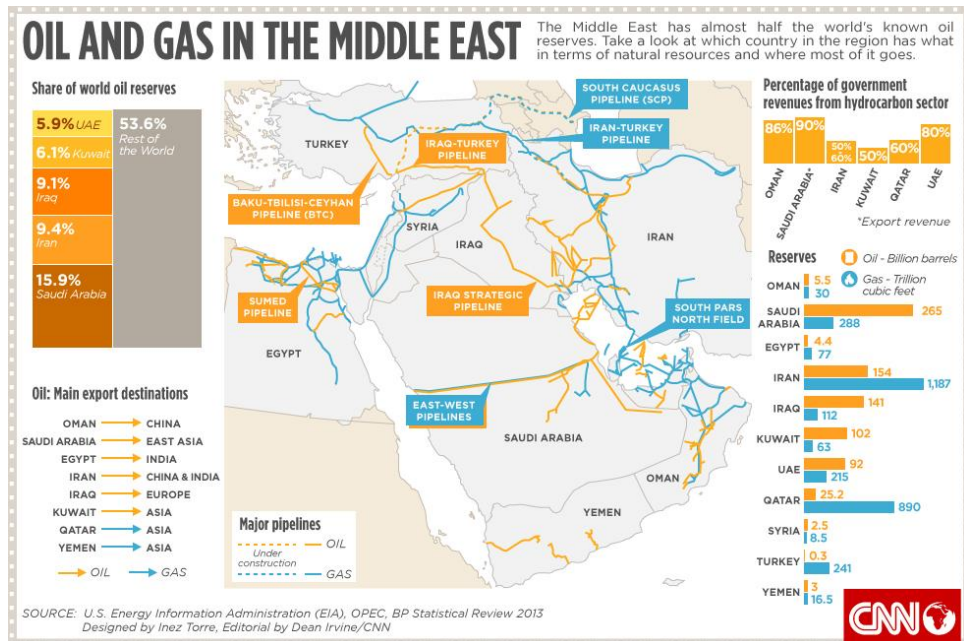
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah tidak dapat dilepaskan dari kepentingan utamanya, yaitu ketergantungan negara tersebut terhadap bahan bakar minyak. Kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah semakin besar setelah pada tahun 2013, kawasan Timur Tengah memiliki kandungan minyak sebesar 794,9 juta barel atau 46,4% dari total cadangan minyak dunia dan 3,128 trillion cubic feet gas alam.⁵²

⁵⁰ Databoks, 14 September 2016, *Konsumsi Minyak Mentah Dunia*, diakses dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/14/konsumsi-minyak-mentah-dunia-95-juta-barel-per-hari> pada 6 April 2017.

⁵¹ U.S. Energy Information Administration, 29 Maret 2017, *How much oil is consumed in the United States?*, diakses dalam <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=33&t=6> pada 6 April 2017.

⁵² *Ibid.*

Gambar 2.2. Kandungan Minyak dan Gas di Kawasan Timur Tengah Tahun 2013



Sumber: CNN, 11 Juni 2014, *Fueling the world: A guide to the Middle East's oil and gas reserves*, diunduh 22 April 2017.
(<http://edition.cnn.com/2014/06/11/world/meast/middle-east-oil-and-gas-who-has-what/>)

Menurut data yang dilansir oleh *Energy information Agency*, prospek konsumsi energi akan naik menjadi 71 persen dari tahun 2003 hingga 2030. Mayoritas konsumsi tersebut sebagian besar didapat dari bahan bakar minyak. Selain itu, dalam rentan tahun 2005 hingga 2030 konsumsi dunia dan Amerika Serikat akan naik sebesar 39 persen dan 23 persen.⁵³

2. Peristiwa 9/11

Serangan 11 September 2001 silam telah terbukti memberikan efek yang luar biasa tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga terhadap

⁵³ Bradley L. Bowman, 2008, *After Iraq: Future U.S. Military Posture in the Middle East*, The Washington Quarterly, vol. 31, no. 2, 77-91, hal. 78.

perkembangan keamanan global. Tantangan keamanan dunia pasca Perang Dingin yang selalu didengarkan selama ini, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan *unipolar*. Sejak Perang Dingin berakhir, hegemoni AS di berbagai belahan dunia semakin terlihat.⁵⁴

Peristiwa 9/11 atau juga disebut dengan tragedi runtuhnya *World Trade Center* (WTC) menjadi momentum perubahan warna dalam politik luar negeri Amerika Serikat yang sejak berakhirnya Perang Dingin cenderung mengedepankan pendekatan ekonomi daripada militer. Konsentrasi hubungan luar negeri Amerika Serikat juga lebih diwarnai dengan isu-isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, dan senjata pemusnah massal. Namun, pasca peristiwa 9/11 warna politik luar negeri Amerika Serikat berubah drastis. Isu keamanan mendapatkan tempat utama dalam kepentingan nasionalnya dan terorisme menjadi masalah yang mendominasi hubungan Amerika Serikat dengan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah.⁵⁵

⁵⁴ Dewi Triwahyuni, *Perubahan Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 untuk Kawasan Asia Tenggara*, FISIPOL, Universitas Komputer Indonesia, diakses dalam <http://kepo.unikom.ac.id/30659/1/bu-dewi-triwahyuni.pdf> pada 6 April 2017.

⁵⁵ *Ibid.*

Gambar 2.3. Peristiwa Penyerangan *World Trade Center* (WTC)



Sumber: Denny .A, 7 September 2012, *Kisah Menakjubkan Korban Selamat Peristiwa 9/11*, diakses dalam [viva.co.id](http://dunia.news.viva.co.id/news/read/349453-kisah-menakjubkan-korban-selamat-peristiwa-9-11) pada 22 April 2017.
(<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/349453-kisah-menakjubkan-korban-selamat-peristiwa-9-11>)

Terminologi terorisme sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan jauh sebelum peristiwa 9/11 terjadi, Dick Cheney yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat di bawah Administratif Clinton (1993), telah membahas terorisme serta isu-isu lain, seperti perdagangan narkoba dan obat bius, dan proliferasi senjata-senjata pemusnah massal dalam strategi pertahanan regional-nya. Artinya, meskipun terorisme telah lama dikenal sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional, tidak membuat Amerika Serikat siap menghadapi serangan terorisme. Hal ini diperkuat dengan reaksi nyata baik pemerintah maupun publik Amerika Serikat yang terkejut dalam

peristiwa 11 September 2001, yang meruntuhkan gedung menara kembar WTC di jantung kota dan pusat finansial New York.⁵⁶

Peristiwa WTC 11 September 2001 telah membangkitkan kesadaran Amerika Serikat bahwa satu-satunya kekuatan di dunia yang mampu mengimbangi Amerika Serikat, yaitu kekuatan politik Islam. Kekhawatiran ini berulang ulang disampaikan oleh cendikiawan Amerika Serikat, seperti Huntington maupun para politisi seperti Henry Kissinger. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat kemudian banyak melakukan tindakan menekan dan memberangus potensi kekuatan politik Islam.⁵⁷

Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan kontra terorisme yang cukup kontroversial, dengan nama *Patriot Act* pada tanggal 26 Oktober 2001 yang memberi legitimasi secara sepihak untuk melakukan operasi pemberantasan terorisme hingga wilayah negara lain yang dicurigai menjadi sarang atau terkait dengan terorisme, utamanya yang terkait dengan negara asal pelaku serangan 9/11. Kebijakan kontra terorisme Amerika Serikat memutuskan bahwa semua tindakan teroris dan kriminal tidak dapat ditolerir dan mengutuk aksi-aksi ini tanpa membeda apapun motivasi dan tujuan mereka serta tidak akan membuat konsekuensi atau perjanjian pada teroris karena hanya akan mengundang lebih banyak tindakan teroris.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Sidik Jatmika, Op.Cit.*, hal. 144.

⁵⁸ History, 26 Oktober 2001, *George W. Bush signs the Patriot Act*, diakses dalam <http://www.history.com/this-day-in-history/george-w-bush-signs-the-patriot-act> pada 6 April 2017.

Pada masa kepemimpinan George W. Bush, rumusan strategi kontra terorisme Amerika didasarkan atas strategi 4D (*Defeat, Deny, Diminish, Defend*) dalam memerangi terorisme, sehingga menciptakan kondisi *War on Terror* di seluruh dunia. Sebagai konsekuensinya, politik luar negeri Amerika Serikat terlihat lebih agresif, rigid, dan kaku dalam implementasinya.⁵⁹ Kebijakan ini dalam tesis Samuel P. Huntington dipahami sebagai perwujudan sistem *unipolar*.⁶⁰ Atas dasar tersebut, tentara Amerika Serikat dengan dalih menjaga keamanan internasional dapat hadir dimana saja tanpa memperdulikan kedaulatan negara lain Bahkan pandangan Amerika Serikat terhadap Afganistan menciptakan opini internasional yang negatif, utamanya bagi negara yang mayoritas penduduknya muslim.⁶¹

Tudingan Bush kembali ditegaskan ketika dia berpidato di hadapan Kongres pada tanggal 20 September 2001. Pidato ini menandai dimulainya perang melawan terorisme (*war on terrorism*), yang merupakan landasan bagi kebijakan luar negeri AS dalam melawan terorisme di seluruh dunia. Bush berkata:

“Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Every nation in every region now has a decision to make: either you are with us, or you are with the terrorist.

⁵⁹ George W. Bush, 29 Januari 2002, *National Strategy for Combating Terrorism*, diakses dalam https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf pada 6 April 2017, hal. 15.

⁶⁰ Samuel P. Huntington, 2006, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, New York, Rockefeller Center, hal 21.

⁶¹ Paul R. Pillar, 2004, *Terrorism and U.S. Foreign Policy*, Washington, D.C., Brookings Institution Press, hal. 47.

From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.”⁶²

Dalam kesempatan lain, Bush menyatakan Osama berada di bawah perlindungan rezim Taliban yang berkuasa di Afghanistan. Karena itu, Bush memperingatkan agar Taliban secepatnya menyerahkan Osama atau akan digempur dan digulingkan dari tampuk kekuasaannya.¹² Namun, peringatan ini diabaikan oleh Taliban. Bahkan, Taliban juga membantah keterlibatan Osama. Akibatnya, pada 7 Oktober 2001, AS melancarkan serangan militer ke Afghanistan. Dalam pidatonya setelah serangan dimulai, Bush berkata:

“The United States of America is an enemy of those who aid terrorists and of the barbaric criminals who profane a great religion by committing murder in its name. This military action is a part of our campaign against terrorism, another front in a war that has already been joined through diplomacy, intelligence, the freezing of financial assets and the arrests of known terrorists by law enforcement agents in 38 countries. The battle is now joined on many fronts. We will not waive, we will not tire, we will not falter, and we will not fail. Peace and freedom will prevail.”⁶³

Amerika Serikat menyerang Afganistan, pasca runtuhnya gedung kembar WTC. Penyerangan yang dilakukan dengan dalih menumbangkan kekuatan terorisme. Gerakan Al Qaeda menjadi sasarannya, disambung dengan perombakan pemerintahan Afganistan dari Taliban kepada pemerintahan Karzei yang pro Amerika Serikat.⁶⁴

⁶² The Washington Post, 20 September 2001, *Text: President Bush Addresses the Nation*, diakses dalam http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html pada 6 April 2017.

⁶³ The Washington Post, 7 Oktober 2001, *Text: Bush Announces Strikes Against Taliban*, diakses dalam http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_100801.htm pada 6 April 2017.

⁶⁴ *Sidik Jatmika, Op.Cit.*

Tidak heran, apabila Amerika Serikat menolak mentah-mentah pendirian pemerintahan Islam pasca Invasi Amerika Serikat di Irak. Amerika Serikat tentu tidak setuju meskipun hal tersebut dituntut oleh masyarakat Irak. Keberadaan pemerintahan Islam tentu akan memperkuat pengaruh politik Islam yang memiliki ciri utama menentang penjajahan terhadap kaum Muslim. Meskipun Amerika Serikat mensponsori terbentuknya pemerintahan yang demokratis di Irak atau negara Muslim lain, Amerika Serikat tetap akan menekan gerakan Islam lewat rezim-rezim bonekanya.⁶⁵

Menyegarkan rezim-rezim lama dengan membentuk rezim baru yang lebih pro Amerika Serikat, yaitu terkait dengan kebijakan lainnya era Pasca Perang Dingin. Isu yang diangkat, yaitu senjata pemusnah masal, mendukung terorisme, demokratisasi, rezim diktator, atau mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat.⁶⁶

Saddam Hussain merupakan salah satu kasusnya. Banyak pihak yang mengetahui bahwa Amerika Serikat lah yang memperkuat rezim Saddam dengan dana dan bantuan militer saat perang melawan Iran. Namun, Sadam perlu disegarkan dengan rezim baru yang lebih pro Amerika Serikat. Hal tersebut juga untuk menghilangkan kesan bahwa Amerika Serikat terus menerus mendukung rezim diktator. Apalagi Amerika Serikat melihat pergantian rezim di Irak akan lebih memaksimalkan pemanfaatan minyak Irak bagi kepentingan Amerika

⁶⁵ *Ibid*, hal. 144-145.

⁶⁶ *Ibid*.

Serikat. Penyegaran rezim ini kemungkinan besar juga akan dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain, seperti Iran dan Suriah.⁶⁷

Mengopinikan demokratisasi Timur Tengah, juga merupakan kebijakan umum politik luar negeri Amerika Serikat. Demokratisasi adalah nilai yang sering dijadikan alat penjajahan oleh Amerika Serikat. Alasan demokratisasi akan dilakukan Amerika Serikat untuk mengganti rezim-rezim Arab yang diktator (tidak peduli meskipun sebelumnya rezim tersebut didukung oleh Amerika Serikat). Dengan alasan tersebut, Amerika Serikat senantiasa bisa mengancam pergantian rezim di negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Suriah, Iran, dan sebagainya.⁶⁸

3. Kepentingan Israel

Negara Israel memproklamkan pendiriannya pada tanggal 14 Mei 1948, setelah menumpahkan banyak darah dari bangsa Palestina. Israel merupakan negara yang mengusung prinsip demokrasi. Setelah terbentuk negara Israel, pada 14 Februari 1949 pertama kalinya dibentuk *Knesset* (Majelis) sebagai sebuah parlemen satu kamar yang para anggotanya dipilih oleh rakyat. Salah satu tugas *Knesset*, yaitu memilih Presiden atau kepala negara untuk masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali. Namun sebagai konsekuensi dari sistem parlementer, jabatan Presiden hanyalah seremonial. Kekuasaan politiknya sangat terbatas. Kekuasaan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

politik yang sebenarnya ada di tangan Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan yang biasanya dijabat oleh pemimpin partai terbesar.⁶⁹

Keberadaan Israel merupakan merupakan bagian dari strategi Barat untuk mendominasi dan menjaga hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Israel berdiri pada tahun 1948, Amerika Serikat menjadi negara yang mengakui berdirinya Israel, Amerika Serikat lebih leluasa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik beberapa negara di Timur Tengah. Bukan menjadi hal yang aneh apabila Amerika Serikat membela mati-matian keberadaan Israel. Berulang-ulang masalah tersebut diungkap oleh pejabat Amerika Serikat dari masa ke masa, siapapun presidennya.⁷⁰

Hal senada ditegaskan oleh Menlu Collin Powel di depan komite anggaran Senat pada 5 Maret 2001, “Israel adalah sahabat dan sekutu yang kuat bagi bangsa Amerika dan pemerintahan Amerika Serikat, menjamin keamanan Israel adalah prioritas utama, akan tetapi seperti itu bagi pemerintahan yang sekarang.”⁷¹

Collin mengulangi dukungan abadi Amerika Serikat kepada Israel saat berpidato di depan komite kerjasama Amerika Serikat-Israel untuk urusan umum (AIPAC) pada 8 Maret 2001 di Washington, “Sungguh, kami telah berada di pihak Israel sejak berdirinya dan kami akan selalu bersama Israel dalam sepanjang sejarahnya.”⁷²

⁶⁹ Riza Sihbudi, *Op.Cit.*, hal. 315

⁷⁰ Sidik Jatmika, *Op.Cit.*, hal. 138.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Selain AIPAC, masih ada *Conference of Presidents of Major Jewish Organizations* (CPMJO). Menurut riset *National Journal* pada Maret 2005 dan *Forbes* pada 1997, dalam hal melobi Washington, AIPAC hanya kalah oleh Asosiasi Pensiunan Amerika Serikat. Mereka didukung tokoh-tokoh terkemuka Kristen Evangelis, seperti Gary Bauer, Jerry Falwell, Ralph Reed, Pat Robertson yang bernaung di bawah bendera *The American Alliance of Jews and Christians* (AAJC). Kelompok ini muncul pada Juli 2002 dipimpin Bauer dan Rabi Daniel Lapin. Kuatnya lobi Israel di Amerika Serikat telah berhasil memaksa mereka untuk mengucurkan bantuan sebesar \$3 miliar per tahun pada Israel. Bantuan ini merupakan seperlima bantuan luar negeri Amerika Serikat.⁷³

Israel merupakan penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat dengan total terbanyak Pasca Perang Dunia II. Hingga saat ini, Amerika Serikat telah mengucurkan dana bantuan bilateral sekitar \$127,4 miliar. Hampir semua bantuan Amerika Serikat ke Israel dalam bentuk bantuan militer, meskipun di masa lalu Israel juga menerima bantuan ekonomi yang penting.⁷⁴ Berikut rincian bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Israel:

⁷³ Supriyadi, S.Si, 2 Februari 2009, *Antara Obama, Israel, dan Konflik Timur Tengah*, diakses dalam <https://www.eramuslim.com/berita/analisa/antara-obama-israel-dan-konflik-timur-tengah.htm> pada 6 April 2017.

⁷⁴ Jeremy M. Sharp, 22 Desember 2016, U.S. Foreign Aid to Israel, diakses dalam Congressional Research Service, melalui <https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf> pada 6 April 2017.

Tabel 2.1. Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat ke Israel

(millions of dollars)

Year	Total	Military Grant	Economic Grant	Immig. Grant	ASHA	All other
1949-1996	68,030.9	29,014.9	23,122.4	868.9	121.4	14,903.3
1997	3,132.1	1,800.0	1,200.0	80.0	2.1	50.0
1998	3,080.0	1,800.0	1,200.0	80.0	—	—
1999	3,010.0	1,860.0	1,080.0	70.0	—	—
2000	4,131.85	3,120.0	949.1	60.0	2.75	—
2001	2,876.05	1,975.6	838.2	60.0	2.25	—
2002	2,850.65	2,040.0	720.0	60.0	2.65	28.0
2003	3,745.15	3,086.4	596.1	59.6	3.05	—
2004	2,687.25	2,147.3	477.2	49.7	3.15	9.9
2005	2,612.15	2,202.2	357.0	50.0	2.95	—
2006	2,534.5	2,257.0	237.0	40.0	—	0.5
2007	2,503.15	2,340.0	120.0	40.0	2.95	0.2
2008	2,423.9	2,380.0	0	40.0	3.90	0
2009	2,583.9	2,550.0	0	30.0	3.90	0
2010	2,803.8	2,775.0	0	25.0	3.80	0
2011	3,029.22	3,000.0	0	25.0	4.225	0
2012	3,098.0	3,075.0	0	20.0	3.00	0
2013	2,943.234 (After Sequestration)	3,100.0	0	15.0	—	0
2014	3,115.0	3,100.0	0	15.0	—	0
2015	3,110.0	3,100.0	0	10.0	—	0
2016	3,110.0	3,100.0	0	10.0	—	0
2017 request	3,107.5	3,100.0	0	7.5	—	0
Total	127,410.804	79,823.4	30,897.0	1,708.2	162.075	14,991.9

Notes: ESF was earmarked for \$960 million for FY2000 but was reduced to meet a 0.38% rescission. FY2000 military grants include \$1.2 billion for the Wye agreement and \$1.92 billion in annual military aid. Final amounts for FY2003 are reduced by 0.65% mandated rescission, and final amounts for FY2004 are reduced by 0.59%.

The \$600 million in housing loan guarantees, \$5.5 billion in military debt reduction loan guarantees, \$9.2 billion in Soviet Jew resettlement loan guarantees, and \$9 billion in economic recovery loan guarantees are not included in the tables because the United States government did not transfer funds to Israel. The United States underwrote loans to Israel from commercial institutions. Total aid figure does not include most recently requested amounts.

Sumber: Jeremy M. Sharp, *U.S. Foreign Aid to Israel*, hal. 35.

Selain mengenai dana, dukungan Amerika Serikat juga diaplikasikan pada PBB. Tercatat sejak tahun 1972 sampai tahun 2006, sudah 66 resolusi PBB yang berhubungan dengan eksistensi Israel di Palestina diveto oleh Amerika Serikat. Ini belum termasuk resolusi setelah tahun tersebut plus resolusi terakhir saat Israel melancarkan agresinya di

Gaza.⁷⁵ Berikut beberapa veto Amerika Serikat terhadap resolusi DK PBB berhubungan dengan kasus Israel-Palestina:

Tabel 2.2. Beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah di Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Israel di Gaza

No	Tanggal Resolusi	Keterangan
1	2 April 1982	Mengecam Israel untuk menghentikan kependudukan di West Bank dan Jalur Gaza dan karena penolakannya mematuhi <i>Geneva Convention protocols of civilized nations</i> .
2	2 Agustus 1983	Mengecam Israel untuk mengentikan kependudukannya di Gaza mengingat bahwa hal tersebut mengganggu perdamaian.
3	26 Maret 2001	Menyerukan pasukan observer PBB di West Bank dan Jalur Gaza.
4	24 Maret 2004	Mengecam Israel atas pembunuhan pemimpin spiritual Palestina Sheikh Ahmed Yassin dalam serangan rudal di Gaza.
5	5 Oktober 2004	Mengecam serangan militer Israel di Gaza, menyebabkan banyak kematian warga sipil dan kerusakan properti.
6	11 November 2006	Menyerukan untuk menghentikan operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Sumber: Savira D. Hardianti, *Akibat Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza*, hal. 14-15.

Salah satu agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang dilangsungkan pada 11 November 2006 dengan draft resolusi nomor S/2006/878 tidak tercapai seperti yang tertera pada tabel di atas. Draft resolusi tersebut dibentuk dengan harapan serangan roket Israel di Gaza dapat dihentikan dan Israel menarik pasukannya di Jalur Gaza, termasuk okupasi di Jerussalem, karena melanggar beberapa aturan dalam Hukum Internasional. Namun perwakilan Amerika Serikat, Bolton, saat itu menyampaikan bahwa draft Resolusi tersebut tidak menampilkan karakterisasi dari peristiwa terakhir di Gaza, juga tidak memajukan

⁷⁵ Supriyadi, S.Si, *Op.Cit.*

perdamaian Israel-Palestina yang diinginkan dan yang mereka telah kerjakan dengan penuh kesungguhan. Maka saat pengambilan suara Amerika Serikat menolak draft.⁷⁶

Veto yang digunakan oleh Amerika terhadap kasus Agresi Israel di Palestina sering dilakukan. Veto yang dilakukan bermuatan kepentingan politik Amerika terhadap Israel.⁷⁷

C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pasca *Arab Spring*

Pada penghujung tahun 2010 hingga tahun 2013, kawasan Timur Tengah mengalami pergolakan politik luar biasa yang dikenal dengan istilah “*Arab Spring*”. Revolusi ini bertujuan untuk menumbangkan rezim otoriter dan menggantikannya dengan sistem demokrasi. Revolusi ini dilakukan oleh rakyat kepada para pemimpin mereka untuk pesan yang sama, yaitu menginginkan perubahan fundamental terhadap kekuasaan dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.⁷⁸

Peristiwa *Arab Spring* ini bermula dari pergolakan rakyat Tunisia, kemudian menjalar ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.⁷⁹ Transformasi dari negara-negara Timur Tengah tersebut membuka mata dunia, terutama negara adidaya Amerika Serikat yang cenderung sering berpartisipasi dalam urusan kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat menginginkan agar posisinya menjadi satu-satunya kekuatan yang dapat

⁷⁶ Savira D. Hardianti, *Akibat Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza*, hal. 15-16.

⁷⁷ *Ibid.*

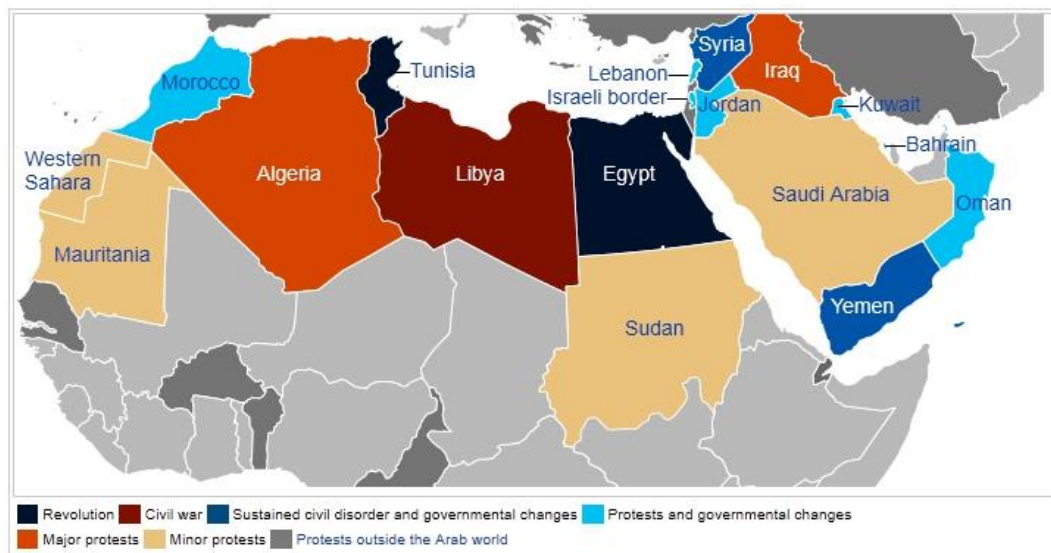
⁷⁸ *Azhari Setiawan, Op.Cit.*, hal. 67-68

⁷⁹ *Apriadi Tamburaka, Op.Cit.*, hal. 9.

mendominasi di kawasan tersebut. Namun di lain sisi, tumbangnya rezim-rezim otoriter di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran Barat akan bangkitnya gerakan fundamentalis Islam. Gerakan-gerakan kelompok tersebut dikekang dan ditekan pada saat rezim-rezim otoriter berjaya di negara-negara kawasan tersebut.⁸⁰

Proses perubahan yang terjadi di Timur Tengah pasti akan berdampak pada kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Terlebih peristiwa *Arab Spring* secara beruntun menimpa negara-negara di Timur Tengah yang membuahkan efek domino selama kurang lebih 2 tahun.⁸¹

Gambar 2.4. Peta *Arab Spring*



Sumber: A Colby Community, *Arab Spring and Egyptian Revolution*, diunduh 22 April 2017 (<http://web.colby.edu/contemporary-issues/as-about-us/ngallery/thumbnails>)

⁸⁰ Kenneth M. Pollack, Mei 2014, *Why Washington Should Focus on the Middle East*, Council on Foreign Relations, diakses dalam <http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/near-eastern-promises/p32891> pada 7 April 2017.

⁸¹ Danial Darwis, *Kerangka Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Timur Tengah Pasca Arab Spring*, FISIPOL, Universitas Gajah Mada.

James N. Mattis selaku komandan pusat angkatan bersenjata Amerika Serikat menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi fokus Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah Pasca *Arab Spring*. Keempat faktor tersebut, yaitu 1) keamanan nasional Amerika Serikat dan warga negara Amerika Serikat, 2) stabilitas regional, 3) promosi terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintahan, hak asasi manusia, penegakkan hukum, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, 4) kebebasan untuk melakukan hubungan dagang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara di dalam lingkup regional.⁸²

Dalam kasus *Arab Spring* di Timur Tengah, nampaknya proses revolusi yang terjadi di Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya menunjukkan kentalnya pendekatan yang lebih cenderung bersifat akomodasionis. Akomodasionis menekankan kritik pada wacana dominan mengenai Islam Politik lebih didasarkan pada perhitungan serta kekhawatiran yang pragmatis dan bukannya disebabkan alasan-alasan kekaguman atau rasa menghargai terhadap kaum Muslim. Pelan tapi pasti, terkikisnya tatanan politik yang berlaku membuat para akomodasionis merekomendasikan pendekatan inklusif, bukan eksklusif, yang bisa mengamankan kepentingan Amerika Serikat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks ini saran-saran kebijakan akomodasionis berakar dari realitas politik dan bukannya sentimen ideologis. Akomodasionis tidak mengabaikan politik riil, melainkan mereka tergerak untuk menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat dengan landasan politik dan pertahanan-keamanan. Artinya,

⁸² Brian Katulis, 2012, *Managing Change in Egypt: Advancing a New U.S. Policy that Balances Regional Security with Support for Egyptian Political and Economic Reforms*, hal.5.

mereka akan merangkul kelompok moderat dan meminimalisasi pengaruh dari kelompok radikal.⁸³

Hal tersebut ditunjukkan melalui strategi yang dilakukan oleh partai-partai yang memenangkan pemilu pasca revolusi di beberapa negara Timur Tengah. Sebab mereka mentoleransi proses pemilu dan demokrasi, meskipun Islam telah memainkan peran sentral dalam perubahan tetapi kelompok-kelompok seperti An-Nahdah di Tunisia dan Ikhwanul Muslimin di Mesir melalui proses pemilu yang dimenangkannya lebih memilih untuk bersikap moderat terhadap Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk bersikap lunak terhadap Barat, sikap tersebut tentu sejalan dengan kepentingan Barat, utamanya Amerika Serikat yang memang berusaha untuk merangkul negara-negara di kawasan agar tetap menjalin hubungan persahabatan dengan Amerika Serikat. Secara umum negara-negara yang bersahabat dengan Amerika Serikat akan memberikan keuntungan bagi terjaganya kepentingan Amerika Serikat di kawasan.⁸⁴

D. Standar Ganda Amerika Serikat di Timur Tengah

Amerika Serikat dalam berbagai kesempatan senantiasa membanggakan diri sebagai “*the champion of democracy*” dan “*the guardian of democracy*”. Hal tersebut dilakukan melalui kecaman diplomatik, sanksi ekonomi, hingga aksi militer.⁸⁵

⁸³ *Danial Darwis, Op.Cit.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Sidik Jatmika, Op.Cit.*, hal. 145.

Noam Chomsky, berdasarkan dokumen-dokumen yang berhasil dia akses, bahwa berdasarkan *National Security Council Memorandum 68* pada 1950, telah mengembangkan apa yang dinamakan “*roll-back strategy*” berdasarkan gagasan Menteri Luar Negeri, Dean Acheson. Inti gagasan dari strategi ini, Amerika Serikat akan menegosiasikan penyelesaian konflik dengan negara pesaingnya (dalam konteks waktu itu, Uni Soviet), dengan mengedepankan “syarat-syarat tertentu”.⁸⁶

Jika dicermati *roll-back strategy* tersebut, inilah cikal bakal dari kebijakan *double standar* Amerika Serikat terkait soal pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang dilakukan negara-negara lain. Jika Amerika Serikat berpandangan bahwa suatu negara berpotensi untuk menjadi musuh atau tidak bisa dikendalikan arah kebijakan luar negerinya sehingga mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat, maka isu-isu seperti demokrasi dan hak-hak asasi manusia akan dimunculkan sebagai bagian integral dari “syarat-syarat tertentu” sebagaimana dimaksud dalam *roll-back strategy* tersebut. Sebaliknya, ketika menurut pandangan para perancang kebijakan luar negeri Amerika Serikat negara-negara yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda cukup kooperatif dan siap mendukung arah kebijakan luar negeri dan kepentingan strategis Amerika Serikat, maka isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia dengan sadar akan diabaikan atau bahkan dianggap bukan masalah yang cukup serius dan krusial.⁸⁷

⁸⁶ Hendrajit, *The Global Review*, Meneropong “Kebijakan Standar Ganda” Amerika Serikat (Studi Perbandingan Papua-Indonesia dan Ukraina terkait Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia), 29 Juni 2016, diakses dalam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=19231&type=4 pada 7 April 2017.

⁸⁷ *Ibid.*

Amerika Serikat di Timur Tengah cenderung menggunakan politik standar ganda dengan nilai-nilai demokrasi sendiri. Pertama, mendukung dan membantu pemerintahan diktator yang mencampakkan prinsip demokrasi dan HAM, asalkan sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Kedua, meskipun mengabaikan isu demokrasi pada negara-negara Timur Tengah yang bersekutu, tetapi Amerika Serikat selalu menggunakan isu tersebut sebagai alat penekan terhadap negara yang kontra terhadap Amerika Serikat.⁸⁸

Berdasar dari kebijakan-kebijakan tersebut, Amerika Serikat terlihat menjalankan standar ganda, yaitu membisu terhadap praktek pelanggaran demokrasi di negara-negara Timur Tengah yang menjadi sekutunya. Namun, di sisi lain selalu mempermasalahkan isu demokrasi di negara-negara Timur Tengah yang berada di luar siklus politik Amerika Serikat.⁸⁹

Terdapat contoh kontradiksi dimana Amerika Serikat membiarkan dan mempertahankan penguasa Arab Saudi yang tidak demokratis. Hal tersebut untuk mencapai tujuan politik luar negeri secara efisien dan berkelanjutan. Efisien, artinya dengan cukup mendapat persetujuan Raja, segala urusan dapat terselesaikan. Apabila demokratis justru akan rumit. Berkelanjutan, artinya kebijakan rezim monarkhi tidak silih berganti karena suksesi terjadi secara turun temurun.⁹⁰

Sikap standar ganda Amerika Serikat juga ditunjukkan lewat peristiwa kudeta militer yang secara konstitusi dan konsensus internasional tentang

⁸⁸ Musthafa Abd Rahman, *AS dan Proses Demokrasi di Timur Tengah*, Uni Sosial Demokrat, diakses dalam http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=2429&coid=3&caid=22&gid=4 pada 7 April 2017.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Sidik Jatmika, Op.Cit.*, hal. 145.

demokrasi adalah tindakan yang salah dan perlu respon aktif dari dunia internasional. Namun, yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat 180 derajat berbeda dengan respon-respon sebelumnya terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM berat di negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya. Sebut saja, Libya, Suriah, dan negara-negara Timur Tengah lain yang mengalami permasalahan serupa.⁹¹

E. Posisi Sentral Mesir di Kawasan Timur Tengah

Secara umum, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kepentingan-kepentingan di Timur Tengah, seperti dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Hal tersebut disebabkan karena Timur Tengah memiliki nilai strategis dalam politik dunia. Nilai strategis tersebut menjadikan Timur Tengah tempat perebutan dalam menyebarkan pengaruh dan kepentingan bagi negara-negara adidaya, terutama Amerika Serikat. Melihat hal tersebut, para elit pembuat kebijakan Amerika Serikat telah mewaspadai potensi radikal dari berbagai macam revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk *Arab Spring*. Mereka selalu menunjukkan kekhawatiran terhadap revolusi yang menyimpang dari norma-norma konstitusional, liberal, dan kapitalis. Tujuan Kebijakan Amerika Serikat selalu berkaitan dengan pencapaian stabilitas yang dikenal sebagai proses perubahan yang teratur.⁹²

⁹¹ Azhari Setiawan, *Op.Cit.*, hal. 70.

⁹² Stanley Hoffman, 1983, *Dead Ends: American Foreign Policy in the New Cold War*, Cambridge, Ballinger, hal. 11-12, 275.

Gambar 2.5. Posisi Mesir dan Batas Wilayahnya



Sumber: Halokawan, *Batas Wilayah Negara Mesir*, diunduh 22 April 2017. (<https://halokawan.com/batas-wilayah-negara-tetangga-mesir-egypt/>)

Mesir merupakan wilayah penting untuk tujuan strategis Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan oleh posisi Mesir berada pada garis lintang yang menjadi lalu lintas minyak dunia. Selain itu, Mesir juga menjadi lokasi pemberhentian penerbangan dan pengisian bahan bakar untuk pesawat tempur Amerika Serikat menuju ke wilayah Timur Tengah. Terusan Suez merupakan jalur yang menjadi transit utama kapal angkatan laut Amerika Serikat. Jalur ini dari Mediterania ke Laut Merah, kemudian ke Laut Arab, dan Persia. Pada tahun 2006, *U.S. Government Accountability* mencatat antara tahun 2001 dan 2005 pemerintah Mesir memberikan izin penerbangan terhadap 36.553 pesawat militer dan tempat transit 861 kapal angkatan laut Amerika Serikat melalui Terusan Suez.⁹³

Angka tersebut menunjukkan pentingnya Mesir untuk perencanaan strategis Amerika Serikat. Selain itu, wilayah Mesir juga berbatasan dengan Israel

⁹³ U.S. Government Accountability, April 2006, *Office Security Assistance: State and DOD Need to Assess How the Foreign Military Financing Program for Egypt Achieves U.S. Foreign Policy and Security Goals*, diakses dalam <http://www.gao.gov/assets/250/249656.html> pada 7 April 2017.

dan Gaza menjadikan Mesir sebagai aktor penting, strategis, dan politis dalam perdamaian Israel dengan Palestina. Sebelah barat wilayah Mesir juga berbatasan dengan Libya dan Sudan di selatan, kedua negara yang mampu mempengaruhi keamanan wilayah tersebut.⁹⁴

Hubungan bilateral yang terjalin sejak lama antara Amerika Serikat dengan Mesir menghasilkan beberapa generasi perwira militer Mesir yang mengenyam pendidikan dan doktrin Militer Amerika Serikat. Hal tersebut menguntungkan Amerika Serikat terutama dalam perdagangan senjata. Selain itu, mereka juga mengadakan latihan militer bersama yang dikenal dengan sebutan *Bright Star*. Latihan militer bersama tersebut telah membantu Amerika Serikat saat krisis Perang Teluk I tahun 1990-1991.⁹⁵

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan, bahwa seiring dengan beroperasinya berbagai perusahaan tambang minyak Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat memulai melakukan kegiatan intervensinya yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negerinya di kawasan tersebut, seperti kebutuhan akan minyak, peristiwa 9/11, dan kepentingan Israel. Pada penghujung tahun 2010 hingga 2011, Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang disebut sebagai "*Arab Spring*". Terdapat empat hal yang menjadi fokus Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah Pasca *Arab Spring*. Keempat faktor tersebut, yaitu keamanan nasional Amerika Serikat dan warga negara Amerika Serikat, stabilitas regional, promosi terhadap

⁹⁴ Gregory Aftandilian, 2013, *Egypt's New Regime and The Future of The US-Egyptian Strategic Relationship*, US Army War College, hal. 3.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 5.

efektivitas dan legitimasi pemerintahan, hak asasi manusia, penegakkan hukum, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kebebasan untuk melakukan hubungan dagang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara di dalam lingkup regional. Untuk menjaga kepentingannya Timur Tengah, Amerika Serikat sering bersikap Standar Ganda. Salah satu negara Timur Tengah yang memiliki potensi besar, yaitu Mesir. Mesir merupakan wilayah penting untuk tujuan strategis Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan oleh posisi Mesir berada pada garis lintang yang menjadi lalu lintas minyak dunia. Selain itu, wilayah Mesir juga berbatasan dengan Israel dan Gaza menjadikan Mesir sebagai aktor penting, strategis, dan politis dalam perdamaian Israel dengan Palestina. Sebelah barat wilayah Mesir juga berbatasan dengan Libya dan Sudan di selatan, kedua negara yang mampu mempengaruhi keamanan wilayah tersebut. Pada bab selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan Amerika Serikat dengan Mesir yang kemudian akan dibagi dalam beberapa sub bab atau periode.